

JURNAL ILMIAH

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL & HUMANITY

Claudius Bona

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
MEMILIH POLITEKNIK UBAYA

Febrina Dwi Cahyanti, Endang Ernawati

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
KEUANGAN PADA BADAN USAHA-BADAN USAHA SEKTOR MANUFAKTUR
DI PT. BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003-2008

**Bambang Budiarto, Muhammad Indra Mario, Anggun Purrisa Putry,
Risty Mega Rahayu, Relitha Arphilda, Dimas Realino, Wenty Mafitri**
INVESTASI JAWA TIMUR PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN
SURABAYA MADURA

Singgih Widodo Limantoro

DEVELOPING INTERCULTURAL MATERIALS FOR
LEARNING ENGLISH JOYFULLY

Suyanto

PERKEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI INDONESIA 1970-2010:
SEBUAH TINJAUAN MAKROEKONOMI

**JURNAL ILMIAH
SOSIAL & HUMANIORA**
ISSN 0216-1532

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian, kajian atau karya ilmiah di bidang Sosial dan Humaniora.

Ketua Penyunting

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyunting Pelaksana

Jatie K. Pudjibudojo

Sujoko Efferin

A. Hery Pratono

Hartanti

Staf Pelaksana

Tang Hamidy, Hadi Krisbiyanto, Sukono

Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Surabaya

Alamat Penerbit/Redaksi

Gedung Perpustakaan Lt.IV, Universitas Surabaya

Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, 60293

Telp. (031) 2981360, 2981365

Fax. (031) 2981373

Website : <http://lppm.ubaya.ac.id>

Email : lppm@ubaya.ac.id

Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi pernah terbit dengan nama *Unitas* (pertama kali terbit tahun 1992) oleh Lembaga Penelitian Universitas Surabaya.

Isi di luar tanggung jawab Percetakan.

PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Naskah berupa hasil penelitian, kajian atau karya ilmiah yang belum dipublikasi oleh media cetak lain. Naskah diserahkan dalam bentuk cetakan (print out) dalam kertas A4 dengan format program MS Word, 1 ½ spasi, font Times New Roman, minimal 5 halaman dan maksimal 30 halaman.
2. Sistematika naskah hasil penelitian :
 - judul, nama penulis, lembaga tempat menulis
 - abstrak sebanyak 75-200 kata dan 3-5 kata kunci (bahasa Inggris)
 - pendahuluan : latar belakang, masalah dan tinjauan teori
 - metode dan/ atau bahan penelitian
 - hasil dan bahasan
 - kesimpulan dan saran
 - daftar pustaka
3. Sitasi/kutipan acuan sumber ditulis dengan nama penulis dan tahunnya, misalnya :
 - Mendelsohn dan Gorzalka (1987) telah mengembangkan ruang uji khusus untuk mempelajari perilaku seksual tikus ...
 - Beberapa penulis (Patterson, 1982; Shallice & Warrington, 1980) melaporkan kasus-kasus gangguan membaca ...
4. Pustaka acuan sedapat mungkin ditulis sesuai tata tulis yang baku untuk disiplin ilmu yang mendasari penulisan. Untuk tulisan psikologi, misalnya dapat diacu *Publication Manual of American Psychological Association* (1983, atau yang lebih baru), misalnya :
 - a. Buku dengan satu penulis :
Flavell, J.H. 1985. *Cognitive Development*. New Jersey: Prentice Hall.
 - b. Buku dengan dua buah atau lebih penulis :
Martinez, J.L., Kesner, R.P. 1986. *Learning and Memory. A Biological View*. San Diego: Academic Press.
 - c. Karya dalam antologi/kumpulan tulisan/buku :
Loconczy, M.F., Davidson, M., Davies, K.L. 1987. The dopamine hypothesis of schizophrenia. In H.Y. Meltzer (Ed.) *Psychopharmacology: The third generation of progress* (pp. 715-726). New York: Raven Press.
 - d. Artikel dalam jurnal profesional :
Rapoport, J.L. 1989. The biology of obsessions and compulsions. *Scientific American*, 260 (3), pp. 63-69.
 - e. Artikel dalam harian:
Nadesul, H. 19 Juli, 1991. *Hypercaninophobia complex*. *Suara Pembinaan*, h.16.

**JURNAL ILMIAH
SOSIAL & HUMANIORA**
ISSN 0216-1532

Volume 4 Nomor 1, Desember 2010
Halaman 1-84

Claudius Bona

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MEMILIH
POLITEKNIK UBAYA

(hal: 1-33)

Febrina Dwi Cahyanti, Endang Ernawati

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
KEUANGAN PADA BADAN USAHA-BADAN USAHA SEKTOR MANUFAKTUR
DI PT. BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003-2008

(hal: 34-47)

Bambang Budiarto, Muhammad Indra Mario, Anggun Purrriza Putry, Risty Mega

Rahayu, Relitha Arphilda, Dimas Realino, Wenty Mafitri

INVESTASI JAWA TIMUR PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN
SURABAYA MADURA

(hal: 48-60)

Singgih Widodo Limantoro

DEVELOPING INTERCULTURAL MATERIALS FOR
LEARNING ENGLISH JOYFULLY

(hal: 61-69)

Suyanto

PERKEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI INDONESIA 1970-2010:
SEBUAH TINJAUAN MAKROEKONOMI

(hal: 70-84)

PERKEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI INDONESIA 1970-2010: SEBUAH TINJAUAN MAKROEKONOMI

Suyanto

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya

Abstract

Industrial structural change is a major factor to determine key sectors in the development of an economy. In Indonesia, the structure of industry has changed in the past four decades, shifting from agricultural industries to manufacturing industries. This paper discusses the structural change in the economy, especially the industry, of Indonesia from 1970 to 2010. The main objectives of the paper is to analyze the major changes in the structure of the industry, and to identify the key sectors contributed to the economy. The analysis is mainly based on a descriptive analysis, which utilizes the annual industrial statistic of Indonesia and the annual survey of medium and large enterprises of Indonesian manufacturing. The results show that the contribution of agricultural sector decreases in the past four decades. Its position as the top contributor of GDP has been replaced by manufacturing. Within the manufacturing sector, sub-sector of Food, Beverage, and Tobacco (ISIC 31) is the top contributor. Metal Products and Machinery (ISIC 38) is the second top contributor on the value-added of manufacturing industry, followed by Chemical and Pharmaceutical Products (ISIC 35).

Keywords: Industrial structural change, manufacturing, top contributors.

PENDAHULUAN

Struktur ekonomi dan industri di Indonesia mengalami pergeseran selama 40 tahun belakangan ini. Sektor pertanian yang dulunya menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), mencapai 28 persen di tahun 1974, saat ini menduduki urutan ketiga (12,81% tahun 2010), di bawah Industri Pengolahan (25,75%) dan Perdagangan (17,34%) dalam hal sumbangan nilai produk akhir terhadap PDB 2010. Sektor Industri Pengolahan yang pada 1974 hanya menyumbang 8,97% terhadap total PDB, kemudian meningkat kontribusinya menjadi 25,76% pada 2010 (BPS, 2011).

Bergesernya struktur ekonomi ini menunjukkan perubahan lapangan usaha yang menjadi andalan Indonesia. Sebelum 1988, pertanian menjadi sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Sektor Industri pengolahan kemudian menggantikan posisinya menjadi sektor penggerak perekonomian sejak 1988. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa sektor industri pengolahan ini akan menjadi "motor penggerak" pertumbuhan ekonomi (Hill, 1991; Pangestu, 1999). Sektor ini terus berkembang dengan pesat, dalam hal nilai output akhir, nilai tambah, maupun kontribusinya terhadap perekonomian secara umum. Namun kemudian, sektor ini diterpa turbulensi pada 1997, ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis. Sektor industri pengolahan ini kemudian mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDB (Hill, 2000). Namun demikian, sektor ini masih merupakan sektor penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia sampai pada 2010.

Di dalam sektor Industri Pengolahan, sub-sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau (industri dengan Kode ISIC 31). Pada urutan kedua, untuk sebelum 1994, diduduki oleh Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35). Kemudian, sub-sektor Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) menjadi sektor dengan kontribusi ketiga terbesar bagi industri manufaktur Indonesia, sampai 1994. Setelah 1994, sub-sektor Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) kemudian meningkat ke posisi kontributor kedua. Sementara Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) menjadi penyumbang terbesar ketiga. Sementara, sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) tetap merupakan sub-sektor penyumbang terbesar bagi perekonomian.

Perubahan struktur ekonomi dan industri menjadi penting bagi pelaku bisnis dan pengusaha untuk menentukan langkah strategis, guna pengembangan usahanya. Perubahan struktur ekonomi juga memberikan gambaran kepada pemerintah untuk memfokuskan arah pembangunan ekonomi pada sektor yang menjadi kunci dan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Gambaran perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sejak 1970 sampai 2010 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar berpijak pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Demikianlah pentingnya variabel-variabel ekonomi makro dalam membantu keputusan mikro perusahaan.

Dengan dasar pentingnya analisis perubahan struktural ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi bagi perkembangan industri dan pengambilan keputusan strategi dan kebijakan pelaku bisnis dan pemerintah, tulisan ini berusaha mengkaji secara historis perubahan struktur ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memperlihatkan secara makro perkembangan sektor usaha Indonesia sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan strategi pelaku bisnis dan pemerintah. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi lapangan usaha mana yang sudah sunset dan lapangan usaha mana yang saat ini sedang sunshine, dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dikarenakan sifat analisisnya yang hanya deskriptif, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih bersifat studi kuantitatif. Studi deskriptif ini menjadi komplemen bagi studi-studi kuantitatif lainnya, untuk pengambilan keputusan pelaku bisnis dan pemerintah.

Sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut. Pada bagian pertama adalah pendahuluan yang akan menceritakan pentingnya studi ini dan kontribusinya terhadap literatur dan pengambilan keputusan strategis perusahaan dan pemerintah. Bagian kedua akan memperlihatkan gambaran umum perekonomian Indonesia sejak 1970 sampai 2010. Pada bagian ketiga, perubahan struktur industri Indonesia akan menjadi sorotan. Bagian keempat memperlihatkan sub-sektor dalam industri manufaktur yang sedang berkembang. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi.

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia 1970-2010 dan Kebijakan Pemerintah

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 6 persen per tahun selama periode 1970-2010. Selama periode ini, pertumbuhan yang stabil diikuti oleh berbagai tantangan ekonomi yang berbeda. Tahun 1970 sampai 1972, perekonomian dihadapkan pada tantangan pembenahan aturan investasi, perdagangan, perbankan, dan nilai tukar. Beberapa kebijakan investasi yang diperbaiki, antara lain: insentif untuk investor asing berupa *tax holiday*, *tax exemption* untuk impor mesin dan

peralatan, dan garansi repatriasi modal dan keuntungan (Pangestu, 1996). Di sisi perdagangan, kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyederhanaan sistem lisensi impor, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor, dan skema baru untuk bonus ekspor (Bird, 1999). Untuk sektor perbankan, pemerintah melakukan rehabilitasi bank-bank pemerintah dan mengizinkan bank untuk mendapatkan bunga riil positif dari deposito. Kebijakan di sisi nilai tukar dilakukan dengan penerapan sistem nilai tukar tunggal, dari sebelumnya sistem nilai tukar ganda (Bird, 1999; Pangestu 1996).

Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah 1970-2010

Periode	Kebijakan Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata
1970-1972 (Periode penyehatan perekonomian)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan aturan investasi, mencakup <i>tax holiday</i>, <i>tax exemption</i> untuk impor mesin dan peralatan, garansi repatriasi modal dan keuntungan. • Kebijakan perdagangan: penyederhanaan sistem lisensi impor, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, skema baru bonus. • Kebijakan perbankan: rehabilitasi bank-bank pemerintah, mengizinkan bunga riil positif dari deposito. • Kebijakan nilai tukar: penggunaan nilai tukar tunggal 	6%
1973-1982 (Periode Oil Boom)	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi pemerintah dalam perekonomian, berupa peningkatan peran BUMN dan pengurangan peran investasi asing. • Subsidi BUMN. • Nasionalisasi perusahaan asing. 	7%
1983-1986 (Periode pengetatan anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetatan anggaran pemerintah melalui pengurangan subsidi migas dan BUMN. • Gaji pegawai negeri tidak dinaikan. • Investasi di sektor industri berat diatur ulang. • Devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. • Kebijakan sektor keuangan: dilepaskannya <i>credit ceiling</i>, menyingkirkan peran bank swasta. • Kebijakan perdagangan: aturan tata niaga impor, non-tariff barriers. • Kebijakan sektor industri: program promosi pendayagunaan produk dalam negeri. 	5,5%

1987-1996 (Periode liberalisasi perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan liberalisasi perdagangan secara menyeluruh. • Fasilitas duty drawback, penurunan tariff. • Alokasi kuota tekstil yang lebih transparan. • Penghapusan monopoli impor kapas. • Penghapusan halangan non-tarif di sektor elektronik. • Penurunan RERP dari 27% menjadi 11%. 	7%
1997-1999 (Periode krisis ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> • Likuidasi 16 bank. • Bailout dana nasabah. • Pengadopsian nilai tukar mengambang bebas. 	-1,3% pada 1997
2000-2010 (Periode pertumbuhan kembali)	<ul style="list-style-type: none"> • Paket makroekonomi, mencakup stabilitas makroekonomi, reformasi keuangan, dan reformasi aturan investasi. • Post-crisis program. • Peningkatan kualitas layanan pajak dan cukai. • Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. • Perbaiki iklim investasi. 	5%

Sumber: Bird (1999), Basri (2004), Cole dan Slade (1998), Djiwandono (2000), Feridhanuseryawan dan Pangestu, (2004), Goeltom (1995), Hill (1999; 2000), Pangestu (1996), Prawiro (1998), Soesastro (2007), Soesastro and Basri (1998), Thee (1991).

Tantangan yang berbeda dihadapi oleh Indonesia pada 1973 sampai 1982. Periode ini disebut oleh para ahli ekonomi sebagai periode *Oil Booming*, yang ditandai dengan melonjaknya harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi pada periode ini lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu sebesar rata-rata 7 persen per tahun. Pertumbuhan ini digerakan oleh kenaikan harga minyak dunia dan ekspansinya sektor manufaktur, sebanyak 14 persen per tahun. Pada periode ini, pemerintah melakukan intervensi yang besar dalam perekonomian, dengan tujuan meningkatkan kontrol pemerintah terhadap perekonomian. Intervensi ketat ini disebabkan sebagian besar oleh sentimen politik pemerintah terhadap investasi asing. Melonjaknya investasi asing dalam jumlah yang besar pada periode sebelumnya, mendorong pemerintah untuk menekan peran investor asing dalam perekonomian. "Penjajahan ekonomi" dijadikan sebagai

dasar penentuan kebijakan investasi yang ketat (Thee, 1991). Selain itu, tingginya pendapatan dari minyak membuat pemerintah tidak memfokuskan diri pada sektor non-migas (Hill, 2000). Kebijakan intervensi dilakukan pemerintah terutama dalam penyediaan subsidi yang besar bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) (Bird, 1999; Pangestu, 1996).

Di tahun 1983 sampai 1986, Indonesia menghadapi tantangan baru berupa penurunan harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi hanya rata-rata 5.5 persen per tahun. Pemerintah mulai melakukan pengetatan anggaran belanja, dengan melakukan beberapa kebijakan. Pengurangan subsidi untuk migas dan BUMN mulai dijalankan (Pangestu, 1999). Gaji pegawai negeri tidak dinaikan dan investasi di sektor industri berat diatur ulang. Sementara di sektor moneter, pemerintah mendevalusi nilai tukar rupiah terhadap dolar, sebesar 50% (Pangestu dan Boediono, 1986).

Sektor keuangan diatur dengan ketat, credit ceiling mulai dilepas, dan bank swasta ditingkatkan perannya sebagai *financial intermediary* (Goeltom, 1995). Sementara itu, kebijakan di bidang perdagangan semakin ketat, dengan diperkenalkannya aturan tata niaga impor dan berbagai variasi non-tariff barriers. Aturan di sektor industri juga semakin ketat, melalui program Promosi Pendayagunaan Produk Dalam Negeri (Bird, 1999).

Tahun 1987 sampai 1996 merupakan periode fenomenal, dengan adanya penerapan liberalisasi perdagangan secara penuh. Banyak kebijakan perdagangan internasional penting yang diambil, diantaranya: fasilitas *duty drawback*, penurunan tarif, dan sistem alokasi kuota tekstil yang lebih transparan, dan penggantian halangan non-tarif menjadi pajak ekspor (Pangestu, 1996). Fasilitas *duty drawback* mengurangi kontak antara petugas pabean dan calon eksportir atau importer, sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi antar petugas dan eksportir maupun importer. Kebijakan ini dianggap oleh para ahli ekonomi sebagai langkah awal untuk memperlulus liberalisasi perdagangan. Beberapa paket kebijakan liberalisasi perdagangan dijalankan oleh pemerintah, yaitu paket Januari 1987, November 1988, dan Mei 1990. Paket Januari 1987 mencakup pengaturan alokasi kuota sektor industri dan transparansi sistem tender. Paket November 1988 diarahkan pada penghapusan monopoli impor kapas, sedangkan paket Mei 1990 mengarah pada penghapusan halangan non-tarif di

sektor elektronik (Prawiro, 1998). Sejumlah kebijakan perdagangan mengikuti paket-paket reformasi ini antara lain diberlakukan pada Juni 1991, Juli 1992, Oktober 1993, Juni 1994, Mei 1995, dan Juni 1996. Kesemua kebijakan yang beruntun ini disokong oleh kebijakan penurunan Tingkat Proteksi Efektif Rill (*Real Effective Rates of Protection* - RERP). Menurut Fane dan Cordon (1996), RERP menurun tajam dari 27% pada 1987 menjadi 11% pada 1995. Di sektor manufaktur, penurunan RERP bahkan lebih tajam, dari 59% di tahun 1987 menjadi hanya 16% pada 1995. Sektor pertanian juga mengalami penurunan dalam RERP, dari 9% menjadi 4%.

Tahun 1997 menandai berubahnya trend pertumbuhan ekonomi, dari positif menjadi negatif. Krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan -13% di tahun 1998. Krisis ekonomi juga menyebabkan terdepresiasinya rupiah lebih dari 80% dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan antara 1997 sampai 1998 (Djiwandono, 2000; Feridhanu-setyawan dan Pangestu, 2004). Inflasi tinggi sebesar 77,6% pada periode yang sama (Soesastro dan Basri, 1998; Hill, 1999). 16 bank yang tidak sehat dilikuidasi, yang menyebabkan terjadinya reaksi negatif dari masyarakat, dalam bentuk penarikan dana besar-besaran (Cole dan Slade, 1998; Djiwandono, 2000). Pada masa ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal difokuskan pada penyehatan perekonomian. Di bidang moneter, bank sentral melakukan *bailout* terhadap dana nasabah di bank-bank yang dilikuidasi dan bank-bank pemerintah.

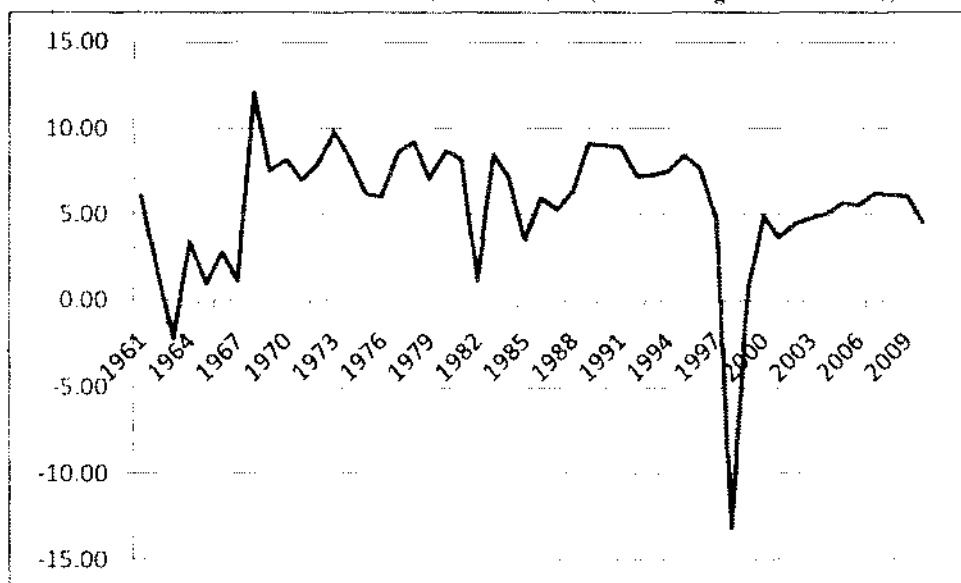
Selain itu, bank sentral juga berusaha melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah, yang berakhir dengan diadopsinya sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*). Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, *exit strategy*, dan kebijakan investasi untuk mencegah *capital flight*.

Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif lagi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5% selama 2000-2010. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi digerakan oleh sejumlah paket makroekonomi, yang dikenal dengan White Paper. Paket makroekonomi ini berisikan agenda stabilitas makroekonomi, reformasi keuangan, dan reformasi aturan investasi (Soesastro, 2007). Beberapa ahli ekonomi

menganggap agenda makroekonomi ini merupakan bagian dari post-program monitoring yang dicetuskan oleh IMF (Basri, 2004). Pemerintah membuka sektor infrastruktur bagi penanaman modal asing melalui Instruksi Presiden No. 3/2006. Peningkatan pelayanan pajak dan cukai, harmonisasi peraturan pusat dan daerah, dan perbaikan iklim investasi, merupakan bagian dari instruksi presiden ini.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 50 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat bahwa selama periode sebelum krisis ekonomi 1997, tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar pada 7%. Pada saat krisis terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan sejak 2000 sampai 2010, pertumbuhan ekonomi menjadi berkisar rata-rata 5%.

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%PDB harga konstan 2000)



Sumber: World Bank, World Development Indicator (WDI), 2011.

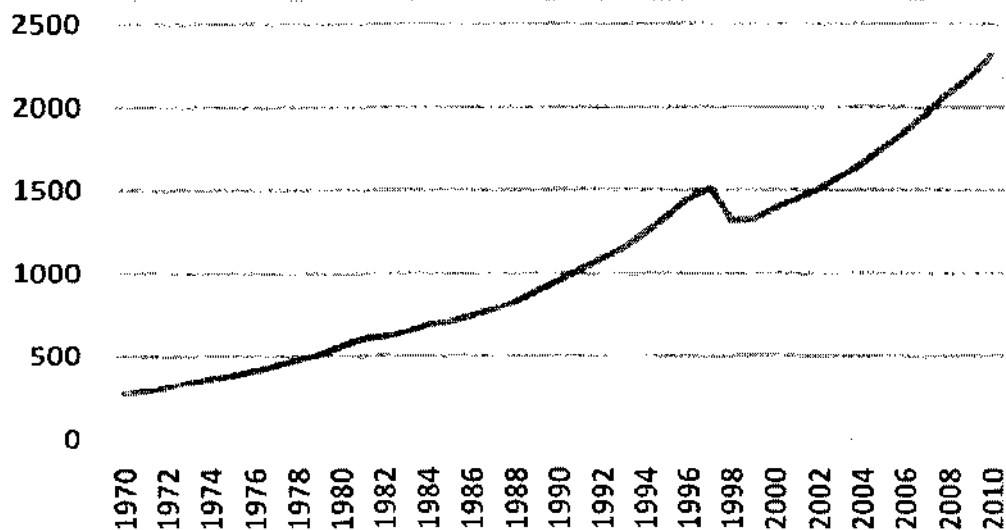
Jika dilihat dari keseluruhan nilai PDB dengan harga konstan 2000, pendapatan nasional Indonesia mengalami penurunan hanya pada saat

krisis 1997. Pada saat sebelum krisis, pendapatan nasional mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan. Terlihat dari trend naik dari kurva PDB

dari Rp 272 trilyun pada 1970 menjadi Rp 1.513 trilyun pada 1996. Pada 1997, PDB riil Indonesia menurun menjadi Rp1.314 trilyun. Namun demikian, penurunan ini hanya bersifat sementara, yang diikuti dengan peningkatan pada

tahun berikutnya. Pada 2003, PDB riil Indonesia telah mencapai posisi yang lebih tinggi daripada sebelum krisis, yaitu sebesar Rp 1.580 trilyun. Tahun 2010, PDB mencapai Rp 2.311 trilyun, posisi tertinggi saat ini.

Gambar 2: PDB Indonesia 1970-2010 dengan Harga Konstan 2000 (trilyun rupiah)



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

Perubahan Struktur Industri Indonesia 1970-2010

Struktur lapangan usaha dan industri Indonesia mengalami pergeseran selama 40 tahun terakhir ini. Gambar 3 memperlihatkan komposisi sektoral 8 lapangan usaha menurut kriteria BPS, untuk tahun 1975, 1990, 2000, dan 2010.¹ Gambar ini memperlihatkan sektor Pertanian dan sektor Pertambangan merupakan dua sektor penyumbang terbesar pendapatan nasional Indonesia pada 1975 (sisi kiri atas Gambar 3). Pertanian berkontribusi sebesar 26,74% terhadap PDB, sedangkan Pertambangan berkontribusi sebesar 25,72%. Sektor Manufaktur dan sektor Jasa masih

merupakan sektor yang berkontribusi relatif kecil, yaitu 10,41% dan 10,08%.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan dilakukannya kebijakan sektor industri yang dimulai pada 1987, struktur lapangan usaha ini mengalami perubahan. Manufaktur tampil sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, sebesar 21,55% (sisi kanan atas Gambar 3). Sektor Perdagangan menjadi sektor yang berkontribusi kedua terbesar, yaitu 16,73%. Sementara sektor Pertambangan menurun drastis dalam sumbangannya terhadap PDB, menjadi hanya sebesar 12,94% (kurang dari separuh kontribusinya pada 1975). Di lain pihak, Pertanian juga mengalami penurunan, meskipun tidak se-drastis Pertambangan, dalam kontribusinya

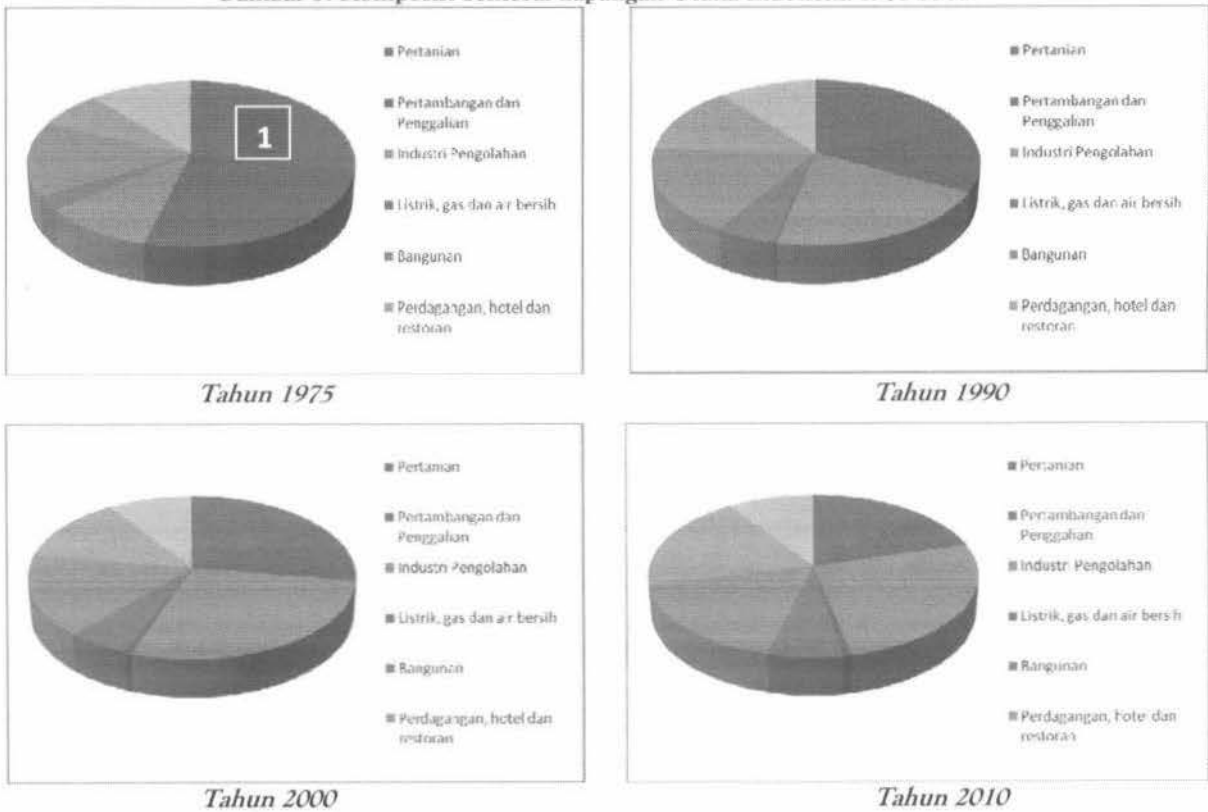
terhadap PDB, sebesar 18,50%. Tahun 1987 ini, menjadi momen penting terjadinya pergeseran dari perekonomian *agriculture* menjadi perekonomian manufaktur. Tahun inilah yang menandai dimulainya industrialisasi di Indonesia.

Di tahun 2000, setelah krisis ekonomi, kontribusi sektor Manufaktur semakin meningkat, menjadi 27,75% (sisi kanan bawah Gambar 3). Terdapat indikasi bahwa sektor Jasa mengalami peningkatan dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, dari 8,97% pada 1975 menjadi 9,34% pada 2000. Sektor Pertanian dan sektor Pertambangan terus mengalami penurunan, secara berurutan menjadi

berkontribusi 15,60% dan 12,07% terhadap PDB riil.

Data terbaru tahun 2010 memperlihatkan bahwa sektor Jasa semakin mengalami peningkatan dalam kontribusi terhadap PDB, menjadi sebesar 9,42% (sisi kanan bawah Gambar 3). Sektor Perdagangan juga semakin meningkat porsinya dalam PDB, yaitu sebesar 17,34%. Sementara, sektor perdagangan semakin menciut, menjadi hanya berkontribusi 7,80%. Begitu pula halnya sektor Pertanian, yang kontribusinya menjadi hanya 12,81%. Sedangkan, sektor Manufaktur tetap menjadi kontributor utama dalam perekonomian Indonesia 2010, yaitu sebesar 25,76%.

Gambar 3: Komposisi Sektoral Lapangan Usaha Indonesia 1975-2010



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

Keterangan: Dikarenakan terbitan jurnal tidak berwarna, untuk memudahkan pembaca, penulis memberikan tanda 1 untuk sektor Pertanian. Sektor selanjutnya mengikuti arah jarum jam adalah Pertambangan dan Penggalian; Manufaktur; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan; Keuangan; Jasa-jasa.

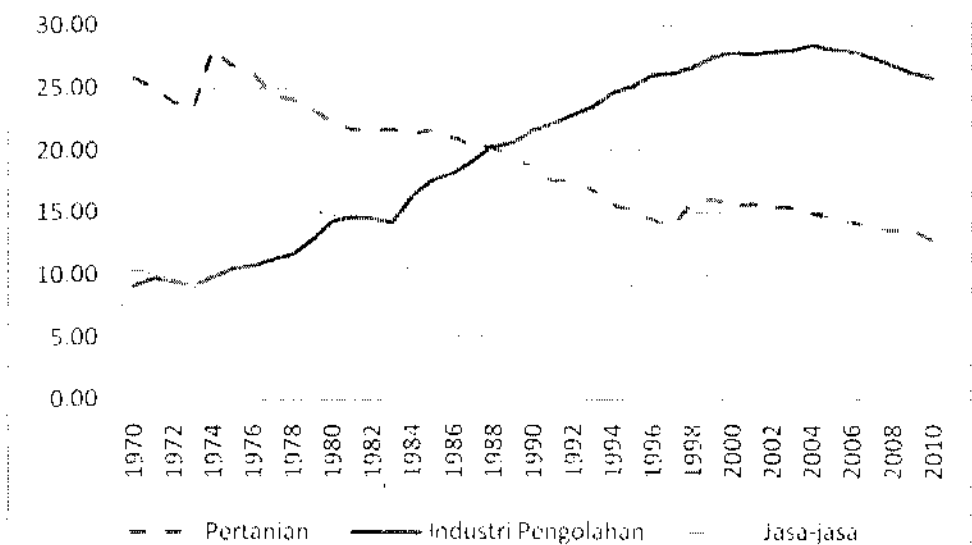
Untuk melihat lebih jelas perubahan struktur industri dari Pertanian menjadi Manufaktur, Gambar 4 menunjukkan data time-series untuk sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Tujuan dari gambar ini adalah untuk memperlihatkan peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian menjadi pertanian yang berbasis manufaktur.

Seperti yang terlihat pada Gambar 4, kontribusi sektor Pertanian dalam PDB melebihi sektor manufaktur sebelum 1987. Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan kebijakan di bidang manufaktur, yang diperkenalkan mulai 1984 dan secara luas dilaksanakan pada 1987, terlihat bahwa sektor Manufaktur kemudian menjadi sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sektor

Manufaktur yang pada awalnya memiliki kontribusi lebih kecil daripada sektor jasa di tahun 1970 (9,06% untuk Manufaktur dan 9,30% untuk Jasa), kemudian mulai memperlihatkan kekuatannya melalui peningkatan kontribusi yang sangat signifikan sampai tahun 2010. Meskipun terjadi penurunan dalam persentase kontribusinya, sektor Manufaktur tetap merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Indonesia sampai dewasa ini.

Salah satu kejadian penting yang dapat dicatat dari Gambar 4 adalah sektor Manufaktur mulai melampaui sektor Pertanian dalam kontribusinya terhadap PDB riil, terjadi pada 1987. Tahun ini pula lah yang menandai dimulainya liberalisasi perdagangan dan industri manufaktur.

Gambar 4: Kontribusi Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa terhadap PDB Indonesia (%)



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

Perubahan Struktur Lapangan Usaha dalam Industri Manufaktur, 1970-2010

Bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa sektor Manufaktur memberikan

kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia sejak 1987. Sektor ini menjadi “mesin penggerak” perekonomian, yang terus menjadi andalan sampai saat ini.

Untuk mengetahui lebih men-detail tentang sub-sektor apa saja dalam sektor Manufaktur, yang merupakan kontributor terbesar sektor ini, bagian ini akan mengulas struktur lapangan usaha sampai pada ISIC 2 digit. Analisis sampai sub-sektor yang lebih detail, bahkan sampai ISIC 5 digit, bisa dilakukan dengan tersedianya data dari BPS melalui Survey Industri Besar dan Menengah, yang dilakukan setiap tahun oleh BPS sejak 1975. Namun demikian, untuk sampai pada ISIC 5 digit, diperlukan kertas kerja yang mendetail dan mencakup sampai lebih dari 300 sub-sektor industri manufaktur, maka tulisan ini hanya dibatasi sampai ISIC 2 digit dengan pertimbangan halaman. Alasan yang lebih mendasar adalah penggunaan ISIC yang lebih kompleks (sampai 5 digit) kurang memperlihatkan struktur industri secara keseluruhan. Analisis dengan ISIC 2 digit lebih memiliki kekuatan dalam melihat pola mendasar dalam struktur lapangan usaha. Analisis sampai pada ISIC 4 digit, dilakukan oleh penulis dalam tulisan di *Developing Studies* dengan fokus pada produktivitas industri dan penanaman modal asing (Suyanto dan Salim, 2010). Pembaca yang tertarik untuk mengetahui analisis yang lebih terinci ini, dianjurkan membaca tulisan tersebut. Selain itu, analisis pada level ISIC 3 digit, dilakukan oleh penulis dalam jurnal *World Development* (Suyanto et al., 2009).

Tabel 2 memperlihatkan persentase kontribusi masing-masing sub-sektor dalam industri manufaktur. Sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) merupakan sub-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam

industri Manufaktur, selama 40 tahun belakangan ini. Meskipun perannya menurun pada tahun 1990-an, sub-sektor ini tetap menjadi sub-sektor yang menopang sektor Manufaktur. Sub-sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan yang padat karya, sehingga menyerap tenaga kerja yang relatif besar (Suyanto, 2010). Sumbangan sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau mencapai 46,7% pada 1975. Sumbangan sektor ini terhadap sektor Manufaktur menurun menjadi 29,1% pada 2010. Meskipun kontribusinya menurun selama 40 tahun belakangan ini, sumbangan sub-sektor ini terhadap nilai tambah sektor manufaktur tetap signifikan, menjadi nomor dua terbesar setelah sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38).

Sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) merupakan industri yang berkontribusi kedua terbesar terhadap nilai tambah sektor Manufaktur di tahun 1975. Kontribusi sub-sektor ini menurun dari waktu ke waktu, dan turun ke posisi ketiga penyumbang terbesar di sektor Manufaktur di tahun 1994 sampai 2010. Penurunan kontribusi sub-sektor ini cukup signifikan, dari 20% di tahun 1975 menjadi 13,2% di tahun 2010.

Di lain pihak, sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) merupakan sub-sektor yang memiliki trend meningkat dalam kontribusinya terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Di tahun 1975, sub-sektor ini memberikan kontribusi ketiga terbesar (12,10%). Terjadi peningkatan proporsi yang signifikan di sub-sektor ini, sehingga industri ini mencapai urutan kedua terbesar kontribusinya terhadap PDB di

tahun 2010 (34,5%). Sub-sektor ini merupakan industri yang *sun-shine* di sektor Manufaktur. Berbeda dengan sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) yang sudah mulai *sun-set*.

Hal mendasar lainnya yang ditampilkan oleh Tabel 2 adalah kecilnya sumbangan sub-sektor Logam Dasar Besi dan Baja (ISIC 37) terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Selama 40 tahun belakangan ini, sub-sektor ini merupakan kontributor yang kecil. Di tahun 1975, sub-sektor ini hanya memberikan sumbangan 0,7%. Kontribusinya mulai meningkat di tahun 1980-an. Namun, kontribusi sub-sektor ini kembali menurun di tahun 1990-an dan sampai saat ini. Sub-sektor ini menyumbang 1,5% nilai tambah Manufaktur.

Sub-sektor Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki (ISIC 32) memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap nilai tambah Manufaktur, sebelum

terjadinya krisis ekonomi 1997. Hal ini terlihat dari besarnya persentase nilai tambah sub-sektor ini terhadap sektor Manufaktur. Sumbangan sub-sektor ini terhadap nilai tambah sektor Manufaktur adalah sebesar 10,8% pada 1975. Persentase kontribusinya meningkat sampai 23,9% pada 1994. Krisis ekonomi menurunkan proporsi sumbangan sub-sektor terkait, dan di tahun 2010, sub-sektor ini hanya memberikan kontribusi 9,5% terhadap nilai tambah total sektor Manufaktur. Berkurangnya kontribusi nilai tambah pada sub-sektor ini disebabkan oleh berkurangnya perusahaan-perusahaan padat karya, dikarenakan tingginya biaya pekerja untuk per unit produk (Hill, 2000; Pangestu, 1997). Sub-sektor yang mulanya diramalkan akan menjadi sangat besar ini (lihat Hill, 1991), ternyata tidak dapat bertahan terhadap kompetisi yang ketat dari Cina dan Vietnam.

Tabel 2: Persentase Kontribusi Sub-Sektor dalam Industri Manufaktur

Sub-Sektor	1975	1985	1988	1991	1994	1997	2000	2005	2010
	% kontribusi terhadap total nilai tambah Sektor Manufaktur								
31 Makanan, Minuman, dan Tembakau	46.7	28.6	27.6	23.6	20.1	20.9	18.9	27.4	29.1
32 Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki	10.8	11.1	12.0	16.0	23.9	23.1	19.7	12.3	9.5
33 Barang Kayu	2.5	7.5	11.0	14.4	8.1	8.3	5.9	4.6	3.5
34 Kertas dan Barang Cetak	4.6	3.0	4.8	6.0	4.4	6.2	5.5	5.4	5.0
35 Kimia, Pupuk, dan Barang dari karet	20.0	20.9	16.3	16.7	12.5	13.2	14.7	13.4	13.2
36 Barang Galian Bukan Logam	2.6	5.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.2	3.5	3.0
37 Logam Dasar Besi dan Baja	0.7	8.3	9.9	5.1	5.6	2.1	2.4	1.7	1.5
38 Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	12.1	13.2	13.6	13.3	20.4	21.2	28.1	30.9	34.5
39 Barang lainnya	0.1	1.6	0.4	0.8	1.1	1.2	1.7	0.8	0.7
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Tabulasi penulis dari data mentah Statistik Industri Besar dan Menengah 1985 - 2005 dan Pendapatan Nasional Indonesia, beberapa tahun. Nilai untuk tahun 1975 diperoleh dari Bird (1999) dan Nilai untuk 2010 diperoleh dari Pendapatan Domestik Bruto.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tulisan ini telah mengkaji pergeseran struktur ekonomi dan industri Indonesia selama 40 tahun terakhir ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperlihatkan secara makro perkembangan sektor usaha Indonesia, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan strategi pelaku bisnis dan pemerintah. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi lapangan usaha mana yang sudah *sunset* dan lapangan usaha mana yang saat ini sedang *sunshine*, dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat mengidentifikasi sub-sektor industri mana yang akan menjadi prioritas pengembangan usahanya.

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia sebelum liberalisasi perdagangan dan industri pada 1987. Sektor ini merupakan sektor yang menjadi landasan dan tulang punggung perekonomian Indonesia sebelum pemerintah, melalui kebijakannya, menggeser fokus pengembangan industri pada sektor Manufaktur. Namun demikian, sektor ini semakin menurun kontribusinya terhadap PDB riil Indonesia 20 tahun belakangan ini.

Selain sektor Pertanian, sektor Pertambangan juga merupakan sektor yang memberikan sumbangan besar bagi PDB Indonesia di tahun 1975. Hanya saja, sumbangan sektor ini mengalami penurunan besar di tahun 1990. Pada 2010, sektor ini hanya memberikan kontribusi kurang dari 8 persen.

Di lain pihak, sektor manufaktur merupakan sektor yang sangat berkembang dalam kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Di tahun 1970-an, sektor ini hanya memberikan sumbangan kurang dari 10%. Namun, dengan adanya kebijakan bidang manufaktur, yang ditujukan untuk penguatan sektor ini menghadapi liberalisasi perdagangan, kontribusi sektor ini semakin besar. Sejak 1988, sektor manufaktur memberikan sumbangan di atas 20%, dan mencapai 28,36% di tahun 1996. Adanya krisis ekonomi menyebabkan penurunan kontribusi sektor Manufaktur terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, sektor ini tetap menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB riil, sampai tahun 2010.

Sektor jasa memberikan sumbangan yang semakin tinggi setelah krisis ekonomi 1997. Sektor ini mulai menjadi sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia dewasa ini. Meskipun kontribusinya secara persentase semakin meningkat, sektor ini belum masuk sebagai tiga penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Meneliti lebih rinci dalam sektor Manufaktur, industri Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) merupakan sub-sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi nilai tambah Manufaktur dari 1975 sampai 1991. Walaupun kontribusinya semakin menurun, sub-sektor ini tetap menjadi salah satu sub-sektor kunci dalam sektor Manufaktur.

Di lain pihak, sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) merupakan industri dengan sumbangan

kedua terbesar bagi sektor Manufaktur dari 1975 sampai 1991. Setelah itu, sub-sektor ini menduduki urutan ketiga kontributor terbesar di Manufaktur. Dilihat dari polanya, sub-sektor ini mengalami penurunan dalam persentase kontribusi, terlihat dari semakin kecilnya proporsi industri ini dalam nilai tambah sektor Manufaktur, dari 20% pada 1975 menjadi 13,2% pada 2010.

Industri Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) menjadi sub-sektor yang semakin meningkat dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Sebelum 1991, sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah industri Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) dan industri Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35). Namun, kontribusi sub-sektor ini semakin meningkat dan melampaui industri Kimia, untuk menduduki posisi kedua sebagai penyumbang terbesar sektor Manufaktur.

Dari hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada pelaku bisnis dan pemerintah. Rekomendasi pertama adalah pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih dalam pengembangan sektor pertanian, dengan memfokuskan pada pengembangan *agri-business* (pertanian sebagai dasar bagi manufaktur). Sumber daya alam yang tersedia, dapat dijadikan dasar pengembangan sektor lain dengan sektor Pertanian sebagai sektor hulu (*upstream sector*). Bagi pelaku bisnis, agribisnis dapat dikembangkan melalui

komoditas-komoditas unggulan sektor pertanian yang dimiliki Indonesia, seperti buah-buahan tropikal. Rekomendasi kedua adalah sektor Manufaktur dapat tetap menjadi sektor andalan Indonesia dengan pertimbangan bahwa sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian selama 40 tahun belakangan ini. Rekomendasi ketiga, sektor Jasa dapat dijadikan sektor yang potensial untuk pengembangan ekonomi Indonesia di masa depan. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kontribusi sektor ini pada PDB. Rekomendasi keempat, sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan industri yang memberikan sumbangan terbesar dalam sektor Manufaktur, dan karena itu dapat direkomendasikan sebagai sub-sektor yang menjadi perhatian pemerintah dan pelaku bisnis. Sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatan merupakan sub-sektor yang sedang *sun-shine* dan akan berkembang di masa mendatang.

Meskipun hasil studi ini belum bisa secara rinci memberikan rekomendasi industri spesifik mana (sampai ISIC 5) yang menjadi industri dengan kontribusi terbesar, hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan rekomendasi secara makro tentang industri yang saat ini sedang berkembang dan menjadi industri kunci dalam perekonomian Indonesia. Hasil kajian makro ini, apabila dikomplemenkan dengan kajian mikro sampai tingkat industri terkecil, dapat menjadi landasan yang baik bagi pelaku bisnis untuk strategi ekspansi usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik - BPS. 1975-2008. Statistik Industri Besar dan Menengah, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik - BPS. 1975-2010. Statistik Indonesia, Jakarta.
- Basri, M. C. 2004. Economic Updata 2003: After Five Years of *Reformasi Ekonomi*, What Next? In *Business in Indonesia: New Challenges, Old Problems*, ed. M. C. Basri and P. van der Eng, 39-57. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bird, K. 1999. *Industrial Concentration and Competition in Indonesian Manufacturing*. Unpublished PhD Thesis. Australian National University.
- Cole, D. C. dan Slade, B. F. 1998. Why Has Indonesia's Financial Crisis Been So Bad. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34, 61-66.
- Djiwandono, J. S. 2000. Bank Indonesia and the Recent Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36, 47-72.
- Fane, G. & Condon, T. 1996. Trade Reform in Indonesia, 1987-1995. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32, 33-54.
- Feridhanusetyawan, T. & Pangestu, M. 2004. Indonesia in Crisis: A Macroeconomic Perspective. *CSIS Economics Working Paper Series*, 074, 1-41.
- Goeltom, M. S. 1995. *Indonesia's Financial Liberalization: An Empirical Analysis of 1981-88 Panel Data* Singapore: ASEAN Economic Research Unit, Institute of Southeast Asian Studies.
- Hill, H. 1991. The Emperor's Clothes Can Now be Made in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 27, 89-127.
- Hill, H. 1999. *The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hill, H. 2000. *The Indonesian Economy since 1966*, 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pangestu, M. 1996. *Economic Reform, Deregulation, and Privatization: The Indonesian Experience*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Pangestu, M. 1997. The Indonesian Textiles and Garment Industry: Structural Change and Competitive Challenges. In M. Pangestu & Y. Sato (eds.) *Waves of Change in Indonesia's Manufacturing Industry*. Tokyo: Institute of Developing Economies, 63-94.
- Pangestu, M. dan Boediono. 1986. Indonesia: The structure and Causes of Manufacturing Sector Protection. In C. Findlay & R. Garnaut (eds.) *The Political Economy of Manufacturing Protection: Experiences of ASEAN and Australia*. Sydney: Allen and Unwin.
- Prawiro, R. 1998. *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action* Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Soesastro, H. 2007. Comment on "Indonesia After the Asian Crisis". *Asian Economic Policy Review* 2 (1): 142-143.
- Soesastro, H. dan Basri, M. C. 1998. Survey of Recent Development. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34, 3-54.

Thee, K. W. 1991. The Surge of Asian NIC investment into Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 27 (3): 55-88.

World Bank. 2011. *World Development Indicator*, Database in CD, New York.

Footnote:

BPS membagi kategori lapangan usaha menjadi delapan, yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Keuangan; dan Jasa.

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut,
Surabaya-Indonesia

phone: +62 31 298 1360 /
+62 31 298 1365
fax: +62 31 298 1373

e-mail: lppm@ubaya.ac.id
<http://lppm.ubaya.ac.id>

17.

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : Perkembangan bisnis dan Industri Indonesia 1970-2010: Sebuah Tinjauan Makroekonomi

Jumlah Penulis : 1 Orang

Status Pengusul : Penulis Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora
- b. Nomor ISSN : 0216-1532
- c. Vol, No, Bln, Thn : Vol. 4, No. 1, Desember 2010
- d. Penerbit : Penerbit LPPM Universitas Surabaya
- e. DOI Artikel :
- f. Alamat Web Jurnal :
- g. Terindeks di :


- Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi
 (beri \surd pada kategori yang tepat)
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional / ~~Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS~~

Hasil Penilaian *Peer Review* :

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh ... (2)
		Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional ... (1)	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	---	---	1	1
2.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	---	---	3	3
3.	Kecukupan dan kemutakhiran data/infromasi dan metodologi (30%)	---	---	3	2,5
4.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	---	---	3	3
Total = (100%)		---	---	10	9,5
Nilai Pengusul=					

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
 Jurnal tidak terakreditasi. Telah dilakukan pengecekan similarity. Kajian literatur terhadap perkembangan bisnis dan industri Indonesia, dengan data yang up-to-date ketika penerbitan. Analisis makroekonomi kuat dan beberapa referensi yang kurang mutakhir.

Surabaya, 13 Mei 2016

Reviewer 1


Prof. Dr. R. Wilopo, Ak., CA, CFE

NIP / NPK ... (3) : 36940141
 Unit Kerja ... (4) : STIE PERBANAS Surabaya

17

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah : Perkembangan Bisnis dan Industri Indonesia 1970-2010: Sebuah Tinjauan Makroekonomi

Jumlah Penulis : 1 Orang

Status Pengusul : Penulis Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora
- b. Nomor ISSN : 0216-1532
- c. Vol, No, Bln, Thn : Vol. 4, No. 1, Desember 2010
- d. Penerbit : Penerbit LPPM Universitas Surabaya
- e. DOI Artikel :
- f. Alamat Web Jurnal :
- g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi
(beri √ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional / ~~Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS~~

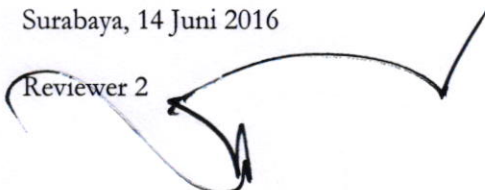
Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh ... (2)
		Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional ... (1)	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	---	---	1	1
2.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	---	---	3	2,5
3.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	---	---	3	2,25
4.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	---	---	3	3
Total = (100%)		---	---	10	8,75
Nilai Pengusul=					

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:

Hasil pengecekan file: jurnal tidak terakreditasi. Tidak ada OJS karena jurnal lama. Check similarity telah dilakukan. Referensi cukup up-to-date. Kontribusi pada kajian deskriptif data mutakhir.

Surabaya, 14 Juni 2016

Reviewer 2 

Prof. Dr. Munawar Ismail, SE, DEA

NIP / NPK ... (3) : 19570212198401003

Unit Kerja ... (4) : FEB Universitas Brawijaya

Perkembangan Bisnis dan Industri Indonesia 1979-2010

by 15 Suyanto

Submission date: 28-Mar-2018 02:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 937472694

File name: Ill.1.C.6.3_asli.doc (368K)

Word count: 4704

Character count: 31082

Perkembangan Bisnis dan Industri Indonesia 1970-2010: Sebuah Tinjauan Makroekonomi

Suyanto
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Surabaya

Abstract

Industrial structural change is a major factor to determine key sectors in the development of an economy. In Indonesia, the structure of industry has changed in the past four decades, shifting from agricultural industries to manufacturing industries. This paper discusses the structural change in the economy, especially the industry, of Indonesia from 1970 to 2010. The main objectives of the paper is to analyze the major changes in the structure of the industry, and to identify the key sectors contributed to the economy. The analysis is mainly based on a descriptive analysis, which utilizes the annual industrial statistic of Indonesia and the annual survey of medium and large enterprises of Indonesian manufacturing. The results show that the contribution of agricultural sector decreases in the past four decades. Its position as the top contributor of GDP has been replaced by manufacturing. Within the manufacturing sector, sub-sector of Food, Beverage, and Tobacco (ISIC 31) is the top contributor. Metal Products and Machinery (ISIC 38) is the second top contributor on the value-added of manufacturing industry, followed by Chemical and Pharmaceutical Products (ISIC 35).

Keywords: Industrial structural change, manufacturing, top contributors.

I. Pendahuluan

Struktur ekonomi dan industri di Indonesia mengalami pergeseran selama 40 tahun belakangan ini. Sektor pertanian yang dulunya menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), mencapai 28 persen di tahun 1974, saat ini menduduki urutan ketiga (12,81% tahun 2010), di bawah Industri Pengolahan (25,75%) dan Perdagangan (17,34%) dalam hal sumbangan nilai produk akhir terhadap PDB 2010. Sektor Industri Pengolahan yang pada 1974 hanya menyumbang 8,97% terhadap total PDB, kemudian meningkat kontribusinya menjadi 25,76% pada 2010 (BPS, 2011).

Bergesernya struktur ekonomi ini menunjukkan perubahan lapangan usaha yang menjadi andalan Indonesia. Sebelum 1988, pertanian menjadi sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor Industri pengolahan kemudian menggantikan posisinya menjadi sektor penggerak perekonomian sejak 1988. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa sektor industri pengolahan ini akan menjadi "motor penggerak" pertumbuhan ekonomi (Hill, 1991; Pangestu, 1999). Sektor ini terus berkembang dengan pesat, dalam hal nilai output akhir, nilai tambah, maupun kontribusinya terhadap perekonomian secara umum. Namun kemudian, sektor ini diterpa turbulensi pada 1997, ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis. Sektor industri pengolahan ini kemudian mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDB (Hill, 2000). Namun demikian, sektor ini masih merupakan sektor penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia sampai pada 2010.

Di dalam sektor Industri Pengolahan, sub-sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau (industri dengan Kode ISIC 31). Pada urutan kedua, untuk sebelum 1994, diduduki oleh Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35). Kemudian, sub-sektor Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) menjadi sektor dengan kontribusi ketiga terbesar bagi industri manufaktur Indonesia, sampai 1994. Setelah 1994, sub-sektor Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) kemudian meningkat ke posisi

kontributor kedua. Sementara Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) menjadi penyumbang terbesar ketiga. Sementara, sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) tetap merupakan sub-sektor penyumbang terbesar bagi perekonomian.

Perubahan struktur ekonomi dan industri menjadi penting bagi pelaku bisnis dan pengusaha untuk menentukan langkah strategis, guna pengembangan usahanya. Perubahan struktur ekonomi juga memberikan gambaran kepada pemerintah untuk memfokuskan arah pembangunan ekonomi pada sektor yang menjadi kunci dan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Gambaran perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sejak 1970 sampai 2010 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar berpijak pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Demikianlah pentingnya variabel-variabel ekonomi makro dalam membantu keputusan mikro perusahaan.

Dengan dasar pentingnya analisis perubahan struktural ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bagi perkembangan industri dan pengambilan keputusan strategi dan kebijakan pelaku bisnis dan pemerintah, tulisan ini berusaha mengkaji secara historis perubahan struktur ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memperlihatkan secara makro perkembangan sektor usaha Indonesia sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan strategi pelaku bisnis dan pemerintah. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi lapangan usaha mana yang sudah sunset dan lapangan usaha mana yang saat ini sedang sunshine, dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dikarenakan sifat analisisnya yang hanya deskriptif, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih bersifat studi kuantitatif. Studi deskriptif ini menjadi komplemen bagi studi-studi kuantitatif lainnya, untuk pengambilan keputusan pelaku bisnis dan pemerintah.

Sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut. Pada bagian pertama adalah pendahuluan yang akan menceritakan pentingnya studi ini dan kontribusinya terhadap literatur dan pengambilan keputusan strategis perusahaan dan pemerintah. Bagian kedua akan memperlihatkan gambaran umum perekonomian Indonesia sejak 1970 sampai 2010. Pada bagian ketiga, perubahan struktur industri Indonesia akan menjadi sorotan. Bagian keempat memperlihatkan sub-sektor dalam industri manufaktur yang sedang berkembang. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi.

II. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia 1970-2010 dan Kebijakan Pemerintah

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 6 persen per tahun selama periode 1970-2010. Selama periode ini, pertumbuhan yang stabil diikuti oleh berbagai tantangan ekonomi yang berbeda. Tahun 1970 sampai 1972, perekonomian dihadapkan pada tantangan pembenahan aturan investasi, perdagangan, perbankan, dan nilai tukar. Beberapa kebijakan investasi yang diperbaiki, antara lain: insentif untuk investor asing berupa *tax holiday*, *tax exemption* untuk impor mesin dan peralatan, dan garansi repatriasi modal dan keuntungan (Pangestu, 1996). Di sisi perdagangan, kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyederhanaan sistem lisensi impor, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor, dan skema baru untuk bonus ekspor (Bird, 1999). Untuk sektor perbankan, pemerintah melakukan rehabilitasi bank-bank pemerintah dan mengizinkan bank untuk mendapatkan bunga riil positif dari deposito. Kebijakan di sisi nilai tukar dilakukan dengan penerapan sistem nilai tukar tunggal, dari sebelumnya sistem nilai tukar ganda (Bird, 1999; Pangestu 1996).

Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah 1970-2010

Periode	Kebijakan Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata
1970-1972 (Periode penyehatan perekonomian)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan aturan investasi, mencakup tax holiday, tax exemption untuk impor mesin dan peralatan, garansi repatriasi modal dan keuntungan. • Kebijakan perdagangan: penyederhanaan sistem lisensi impor, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, skema baru bonus. • Kebijakan perbankan: rehabilitasi bank-bank pemerintah, mengizinkan bunga riil positif dari deposito. • Kebijakan nilai tukar: penggunaan nilai tukar tunggal 	6%
1973-1982 (Periode <i>Oil Boom</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi pemerintah dalam perekonomian, berupa peningkatan peran BUMN dan pengurangan peran investasi asing. • Subsidi BUMN. • Nasionalisasi perusahaan asing. 	7%
1983-1986 (Periode pengetatan anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetatan anggaran pemerintah melalui pengurangan subsidi migas dan BUMN. • Gaji pegawai negeri tidak dinaikan. • Investasi di sektor industri berat diatur ulang. • Devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. • Kebijakan sektor keuangan: dilepaskannya credit ceiling, meningkatkan peran bank swasta. • Kebijakan perdagangan: aturan tata niaga impor, non-tariff barriers. • Kebijakan sektor industri: program promosi pendayagunaan produk dalam negeri. 	5,5%
1987-1996 (Periode liberalisasi perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan liberalisasi perdagangan secara menyeluruh. • Fasilitas duty drawback, penurunan tariff. • Alokasi kuota tekstil yang lebih transparan. • Penghapusan monopoli impor kapas. • Penghapusan halangan non-tarif di sektor elektronik. • Penurunan RERP dari 27% menjadi 11%. 	7%
1997-1999 (Periode krisis ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> • Likuidasi 16 bank. • Bailout dana nasabah. • Pengadopsian nilai tukar mengambang bebas. 	-13% pada 1997
2000-2010 (Periode pertumbuhan kembali)	<ul style="list-style-type: none"> • Paket makroekonomi, mencakup stabilitas makroekonomi, reformasi keuangan, dan reformasi aturan investasi. • Post-crisis program. • Peningkatan kualitas layanan pajak dan cukai. • Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. • Perbaikan iklim investasi. 	5%

Sumber: Bird (1999), Basri (2004), Cole dan Slade (1998), Djiwandono (2000), Feridhanusetyawan dan Pangestu, (2004), Goeltom (1995), Hill (1999; 2000), Pangestu (1996), Prawiro (1998), Soesastro (2007), Soesastro and Basri (1998), Thee (1991).

Tantangan yang berbeda dihadapi oleh Indonesia pada 1973 sampai 1982. Periode ini disebut oleh para ahli ekonomi sebagai periode *Oil Booming*, yang ditandai dengan melonjaknya harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi pada periode ini lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu sebesar rata-rata 7 persen per tahun. Pertumbuhan ini digerakan oleh kenaikan harga minyak dunia dan ekspansinya sektor

manufaktur, sebanyak 14 persen per tahun. Pada periode ini, pemerintah melakukan intervensi yang besar dalam perekonomian, dengan tujuan meningkatkan kontrol pemerintah terhadap perekonomian. Intervensi ketat ini disebabkan sebagian besar oleh sentimen politik pemerintah terhadap investasi asing. Melonjaknya investasi asing dalam jumlah yang besar pada periode sebelumnya, mendorong pemerintah untuk menekan peran investor asing dalam perekonomian. "Penjajahan ekonomi" dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan investasi yang ketat (Thee, 1991). Selain itu, tingginya pendapatan dari minyak membuat pemerintah tidak memfokuskan diri pada sektor non-migas (Hill, 2000). Kebijakan intervensi dilakukan pemerintah terutama dalam penyediaan subsidi yang besar bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) (Bird, 1999; Pangestu, 1996).

Di tahun 1983 sampai 1986, Indonesia menghadapi tantangan baru berupa penurunan harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi hanya rata-rata 5.5 persen per tahun. Pemerintah mulai melakukan pengetatan anggaran belanja, dengan melakukan beberapa kebijakan. Pengurangan subsidi untuk migas dan BUMN mulai dijalankan (Pangestu, 1999). Gaji pegawai negeri tidak dinaikan dan investasi di sektor industri berat diatur ulang. Sementara di sektor moneter, pemerintah mendevaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, sebesar 50% (Pangestu dan Boediono, 1986). Sektor keuangan diatur dengan ketat, credit ceiling mulai dilepas, dan bank swasta ditingkatkan perannya sebagai *financial intermediary* (Goeltom, 1995). Sementara itu, kebijakan di bidang perdagangan semakin ketat, dengan diperkenalkannya aturan tata niaga impor dan berbagai variasi non-tariff barriers. Aturan di sektor industri juga semakin ketat, melalui program Promosi Pendayagunaan Produk Dalam Negeri (Bird, 1999).

Tahun 1987 sampai 1996 merupakan periode fenomenal, dengan adanya penerapan liberalisasi perdagangan secara penuh. Banyak kebijakan perdagangan internasional penting yang diambil, diantaranya: fasilitas *duty drawback*, penurunan tarif, dan sistem alokasi kuota tekstil yang lebih transparan, dan penggantian halangan non-tarif menjadi pajak ekspor (Pangestu, 1996). Fasilitas *duty drawback* mengurangi kontak antara petugas pabean dan calon eksportir atau importer, sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi antar petugas dan eksportir maupun importer. Kebijakan ini dianggap oleh para ahli ekonomi sebagai langkah awal untuk memperlulus liberalisasi perdagangan. Beberapa paket kebijakan liberalisasi perdagangan dijalankan oleh pemerintah, yaitu paket Januari 1987, November 1988, dan Mei 1990. Paket Januari 1987 mencakup pengaturan alokasi kuota sektor industri dan transparansi sistem tender. Paket November 1988 diarahkan pada penghapusan monopoli impor kapas, sedangkan paket Mei 1990 mengarah pada penghapusan halangan non-tarif di sektor elektronik (Prawiro, 1998). Sejumlah kebijakan perdagangan mengikuti paket-paket reformasi ini antara lain diberlakukan pada Juni 1991, Juli 1992, Oktober 1993, Juni 1994, Mei 1995, dan Juni 1996. Kesemua kebijakan yang beruntun ini disokong oleh kebijakan penurunan Tingkat Proteksi Efektif Rill (*Real Effective Rates of Protection* – RERP). Menurut Fane dan Cordon (1996), RERP menurun tajam dari 27% pada 1987 menjadi 11% pada 1995. Di sektor manufaktur, penurunan RERP bahkan lebih tajam, dari 59% di tahun 1987 menjadi hanya 16% pada 1995. Sektor pertanian juga mengalami penurunan dalam RERP, dari 9% menjadi 4%.

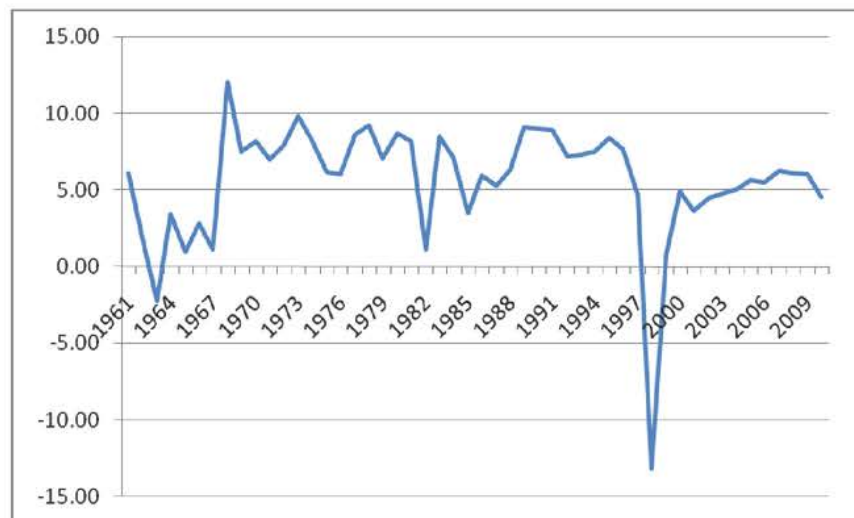
Tahun 1997 menandai berubahnya trend pertumbuhan ekonomi, dari positif menjadi negatif. Krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan -13% di tahun 1998. Krisis ekonomi juga menyebabkan terdepresiasinya rupiah lebih dari 80% dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan antara 1997 sampai 1998 (Djiwandono, 2000; Feridhanusetyawan dan Pangestu, 2004). Inflasi tinggi sebesar 77,6% pada periode yang sama (Soesastro dan Basri, 1998; Hill, 1999). 16 bank yang tidak sehat dilikuidasi, yang menyebabkan terjadinya reaksi negatif dari masyarakat, dalam bentuk penarikan dana besar-besaran (Cole dan Slade, 1998; Djiwandono, 2000). Pada masa ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal difokuskan pada penyehatan perekonomian.

Di bidang moneter, bank sentral melakukan *bailout* terhadap dana nasabah di bank-bank yang dilikuidasi dan bank-bank pemerintah. Selain itu, bank sentral juga berusaha melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah, yang berakhir dengan diadopsinya sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*). Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, *exit strategy*, dan kebijakan investasi untuk mencegah *capital flight*.

Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif lagi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5% selama 2000-2010. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi digerakan oleh sejumlah paket makroekonomi, yang dikenal dengan White Paper. Paket makroekonomi ini berisikan agenda stabilitas makroekonomi, reformasi keuangan, dan reformasi aturan investasi (Soesastro, 2007). Beberapa ahli ekonomi menganggap agenda makroekonomi ini merupakan bagian dari post-program monitoring yang dicetuskan oleh IMF (Basri, 2004). Pemerintah membuka sektor infrastruktur bagi penanaman modal asing melalui Instruksi Presiden No. 3/2006. Peningkatan pelayanan pajak dan cukai, harmonisasi peraturan pusat dan daerah, dan perbaikan iklim investasi, merupakan bagian dari instruksi presiden ini.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 50 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat bahwa selama periode sebelum krisis ekonomi 1997, tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar pada 7%. Pada saat krisis terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan sejak 2000 sampai 2010, pertumbuhan ekonomi menjadi berkisar rata-rata 5%.

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%PDB harga konstan 2000)

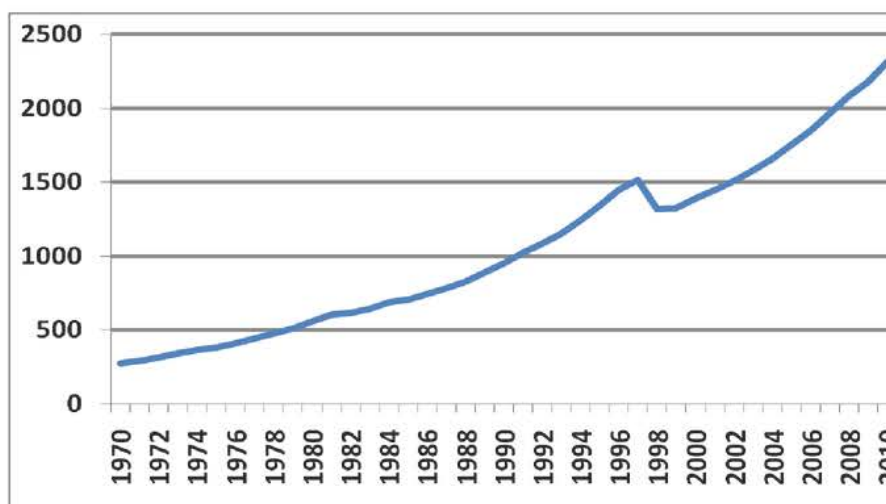


Sumber: World Bank, World Development Indicator (WDI), 2011.

Jika dilihat dari keseluruhan nilai PDB dengan harga konstan 2000, pendapatan nasional Indonesia mengalami penurunan hanya pada saat krisis 1997. Pada saat sebelum krisis, pendapatan nasional mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan. Terlihat dari trend naik dari kurva PDB dari Rp 272 trilyun pada 1970 menjadi Rp 1.513 trilyun pada 1996. Pada 1997, PDB riil Indonesia menurun menjadi Rp1.314 trilyun. Namun demikian, penurunan ini hanya bersifat sementara, yang diikuti dengan peningkatan pada tahun berikutnya. Pada

2003, PDB riil Indonesia telah mencapai posisi yang lebih tinggi daripada sebelum krisis, yaitu sebesar Rp 1.580 trilyun. Tahun 2010, PDB mencapai Rp 2.311 trilyun, posisi tertinggi saat ini.

Gambar 2: PDB Indonesia 1970-2010 dengan Harga Konstan 2000 (trilyun rupiah)



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

III. Perubahan Struktur Industri Indonesia 1970-2010

Struktur lapangan usaha dan industri Indonesia mengalami pergeseran selama 40 tahun terakhir ini. Gambar 3 memperlihatkan komposisi sektoral 8 lapangan usaha menurut kriteria BPS, untuk tahun 1975, 1990, 2000, dan 2010.¹ Gambar ini memperlihatkan sektor Pertanian dan sektor Pertambangan merupakan dua sektor penyumbang terbesar pendapatan nasional Indonesia pada 1975 (sisi kiri atas Gambar 3). Pertanian berkontribusi sebesar 26,74% terhadap PDB, sedangkan Pertambangan berkontribusi sebesar 25,72%. Sektor Manufaktur dan sektor Jasa masih merupakan sektor yang berkontribusi relatif kecil, yaitu 10,41% dan 10,08%.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan dilakukannya kebijakan sektor industri yang dimulai pada 1987, struktur lapangan usaha ini mengalami perubahan. Manufaktur tampil sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, sebesar 21,55% (sisi kanan atas Gambar 3). Sektor Perdagangan menjadi sektor yang berkontribusi kedua terbesar, yaitu 16,73%. Sementara sektor Pertambangan menurun drastis dalam sumbangannya terhadap PDB, menjadi hanya sebesar 12,94% (kurang dari separuh kontribusinya pada 1975). Di lain pihak, Pertanian juga mengalami penurunan, meskipun tidak se-drastis Pertambangan, dalam kontribusinya terhadap PDB, sebesar 18,50%. Tahun 1987 ini, menjadi momen penting terjadinya pergeseran dari perekonomian *agriculture* menjadi perekonomian manufaktur. Tahun inilah yang menandai dimulainya industrialisasi di Indonesia.

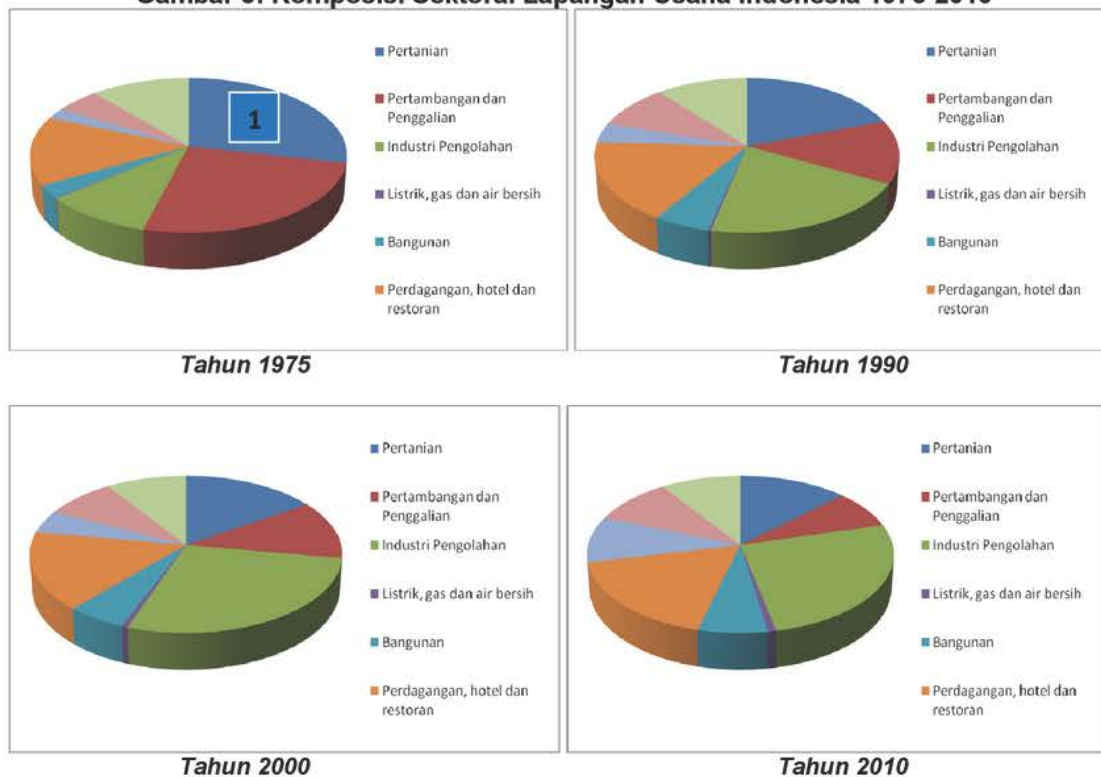
11

¹ BPS membagi kategori lapangan usaha menjadi delapan, yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Keuangan; dan Jasa.

Di tahun 2000, setelah krisis ekonomi, kontribusi sektor Manufaktur semakin meningkat, menjadi 27,75% (sisi kanan bawah Gambar 3). Terdapat indikasi bahwa sektor Jasa mengalami peningkatan dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, dari 8,97% pada 1975 menjadi 9,34% pada 2000. Sektor Pertanian dan sektor Pertambangan terus mengalami penurunan, secara berurutan menjadi berkontribusi 15,60% dan 12,07% terhadap PDB riil.

Data terbaru tahun 2010 memperlihatkan bahwa sektor Jasa semakin mengalami peningkatan dalam kontribusi terhadap PDB, menjadi sebesar 9,42% (sisi kanan bawah Gambar 3). Sektor Perdagangan juga semakin meningkat porsinya dalam PDB, yaitu sebesar 17,34%. Sementara, sektor perdagangan semakin menciut, menjadi hanya berkontribusi 7,80%. Begitu pula halnya sektor Pertanian, yang kontribusinya menjadi hanya 12,81%. Sedangkan, sektor Manufaktur tetap menjadi kontributor utama dalam perekonomian Indonesia 2010, yaitu sebesar 25,76%.

Gambar 3: Komposisi Sektoral Lapangan Usaha Indonesia 1975-2010



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

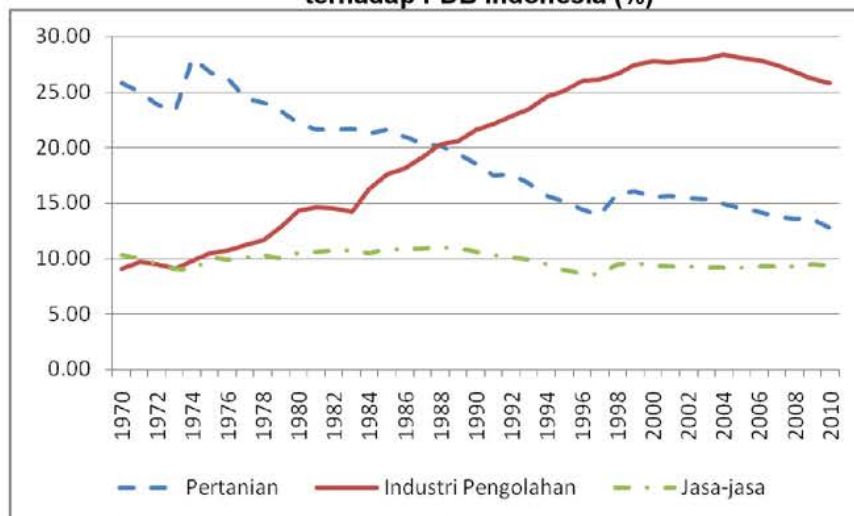
Keterangan: Dikarenakan terbitan jurnal tidak berwarna, untuk memudahkan pembaca, penulis memberikan tanda 1 untuk sektor Pertanian. Sektor selanjutnya mengikuti arah jarum jam adalah Pertambangan dan Penggalian; Manufaktur; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan; Keuangan; Jasa-jasa.

Untuk melihat lebih jelas perubahan struktur industri dari Pertanian menjadi Manufaktur, Gambar 4 menunjukkan data time-series untuk sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Tujuan dari gambar ini adalah untuk memperlihatkan peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian menjadi pertanian yang berbasis manufaktur.

Seperti yang terlihat pada Gambar 4, kontribusi sektor Pertanian dalam PDB melebihi sektor manufaktur sebelum 1987. Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan kebijakan di bidang manufaktur, yang diperkenalkan mulai 1984 dan secara luas dilaksanakan pada 1987, terlihat bahwa sektor Manufaktur kemudian menjadi sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sektor Manufaktur yang pada awalnya memiliki kontribusi lebih kecil daripada sektor jasa di tahun 1970 (9,06% untuk Manufaktur dan 9,30% untuk Jasa), kemudian mulai memperlihatkan kekuatannya melalui peningkatan kontribusi yang sangat signifikan sampai tahun 2010. Meskipun terjadi penurunan dalam persentase kontribusinya, sektor Manufaktur tetap merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Indonesia sampai dewasa ini.

Salah satu kejadian penting yang dapat dicatat dari Gambar 4 adalah sektor Manufaktur mulai melampaui sektor Pertanian dalam kontribusinya terhadap PDB riil, terjadi pada 1987. Tahun ini pula lah yang menandai dimulainya liberalisasi perdagangan dan industri manufaktur.

Gambar 4: Kontribusi Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa terhadap PDB Indonesia (%)



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

IV. Perubahan Struktur Lapangan Usaha dalam Industri Manufaktur, 1970-2010

Bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa sektor Manufaktur memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia sejak 1987. Sektor ini menjadi “mesin penggerak” perekonomian, yang terus menjadi andalan sampai saat ini. Untuk mengetahui lebih men-detail tentang sub-sektor apa saja dalam sektor Manufaktur, yang merupakan kontributor terbesar sektor ini, bagian ini akan mengulas struktur lapangan usaha sampai pada ISIC 2 digit. Analisis sampai sub-sektor yang lebih detail, bahkan sampai ISIC 5 digit, bisa dilakukan dengan tersedianya data dari BPS melalui Survey Industri Besar dan Menengah, yang dilakukan setiap

tahun oleh BPS sejak 1975. Namun demikian, untuk sampai pada ISIC 5 digit, diperlukan kertas kerja yang mendetail dan mencakup sampai lebih dari 300 sub-sektor industri manufaktur, maka tulisan ini hanya dibatasi sampai ISIC 2 digit dengan pertimbangan halaman. Alasan yang lebih mendasar adalah penggunaan ISIC yang lebih kompleks (sampai 5 digit) kurang memperlihatkan struktur industri secara keseluruhan. Analisis dengan ISIC 2 digit lebih memiliki kekuatan dalam melihat pola mendasar dalam struktur lapangan usaha. Analisis sampai pada ISIC 4 digit, dilakukan oleh penulis dalam tulisan di *Developing Studies* dengan fokus pada produktivitas industri dan penanaman modal asing (Suyanto dan Salim, 2010). Pembaca yang tertarik untuk mengetahui analisis yang lebih terinci ini, dianjurkan membaca tulisan tersebut. Selain itu, analisis pada level ISIC 3 digit, dilakukan oleh penulis dalam jurnal *World Development* (Suyanto et al., 2009).

Tabel 2 memperlihatkan persentase kontribusi masing-masing sub-sektor dalam industri manufaktur. Sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) merupakan sub-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam industri Manufaktur, selama 40 tahun belakangan ini. Meskipun perannya menurun pada tahun 1990-an, sub-sektor ini tetap menjadi sub-sektor yang menopang sektor Manufaktur. Sub-sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan yang padat karya, sehingga menyerap tenaga kerja yang relatif besar (Suyanto, 2010). Sumbangan sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau mencapai 46,7% pada 1975. Sumbangan sektor ini terhadap sektor Manufaktur menurun menjadi 29,1% pada 2010. Meskipun kontribusinya menurun selama 40 tahun belakangan ini, sumbangan sub-sektor ini terhadap nilai tambah sektor manufaktur tetap signifikan, menjadi nomor dua terbesar setelah sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38).

Sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) merupakan industri yang berkontribusi kedua terbesar terhadap nilai tambah sektor Manufaktur di tahun 1975. Kontribusi sub-sektor ini menurun dari waktu ke waktu, dan turun ke posisi ketiga penyumbang terbesar di sektor Manufaktur di tahun 1994 sampai 2010. Penurunan kontribusi sub-sektor ini cukup signifikan, dari 20% di tahun 1975 menjadi 13,2% di tahun 2010.

Di lain pihak, sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) merupakan sub-sektor yang memiliki trend meningkat dalam kontribusinya terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Di tahun 1975, sub-sektor ini memberikan kontribusi ketiga terbesar (12,10%). Terjadi peningkatan proporsi yang signifikan di sub-sektor ini, sehingga industri ini mencapai urutan kedua terbesar kontribusinya terhadap PDB di tahun 2010 (34,5%). Sub-sektor ini merupakan industri yang *sun-shine* di sektor Manufaktur. Berbeda dengan sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) yang sudah mulai *sun-set*.

Hal mendasar lainnya yang ditampilkan oleh Tabel 2 adalah kecilnya sumbangan sub-sektor Logam Dasar Besi dan Baja (ISIC 37) terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Selama 40 tahun belakangan ini, sub-sektor ini merupakan kontributor yang kecil. Di tahun 1975, sub-sektor ini hanya memberikan sumbangan 0,7%. Kontribusinya mulai meningkat di tahun 1980-an. Namun, kontribusi sub-sektor ini kembali menurun di tahun 1990-an dan sampai saat ini. Sub-sektor ini menyumbang 1,5% nilai tambah Manufaktur.

Sub-sektor Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki (ISIC 32) memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap nilai tambah Manufaktur, sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997. Hal ini terlihat dari besarnya persentase nilai tambah sub-sektor ini terhadap sektor Manufaktur. Sumbangan sub-sektor ini terhadap nilai tambah sektor Manufaktur adalah sebesar 10,8% pada 1975. Persentase kontribusinya meningkat sampai 23,9% pada 1994. Krisis ekonomi menurunkan proporsi sumbangan sub-sektor terkait, dan di tahun 2010, sub-sektor ini hanya memberikan kontribusi 9,5% terhadap nilai tambah total sektor Manufaktur. Berkurangnya kontribusi nilai tambah pada sub-sektor ini disebabkan oleh berkurangnya perusahaan-perusahaan padat karya, dikarenakan tingginya biaya pekerja untuk per unit produk (Hill, 2000;

Pangestu, 1997). Sub-sektor yang mulanya diramalkan akan menjadi sangat besar ini (lihat Hill, 1991), ternyata tidak dapat bertahan terhadap kompetisi yang ketat dari Cina dan Vietnam.

Tabel 2: Persentase Kontribusi Sub-Sektor dalam Industri Manufaktur

Sub-Sektor	1975	1985	1988	1991	1994	1997	2000	2005	2010
	% kontribusi terhadap total nilai tambah Sektor Manufaktur								
31 Makanan, Minuman, dan Tembakau	46.7	28.6	27.6	23.6	20.1	20.9	18.9	27.4	29.1
32 Textiles, Barang Kulit, dan Alas Kaki	10.8	11.1	12.0	16.0	23.9	23.1	19.7	12.3	9.5
33 Barang Kayu	2.5	7.5	11.0	14.4	8.1	8.3	5.9	4.6	3.5
34 Kertas dan Barang Cetak	4.6	3.0	4.8	6.0	4.4	6.2	5.5	5.4	5.0
35 Kimia, Pupuk, dan Barang dari karet	20.0	20.9	16.3	16.7	12.5	13.2	14.7	13.4	13.2
36 Barang Galian Bukan Logam	2.6	5.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.2	3.5	3.0
37 Logam Dasar Besi dan Baja	0.7	8.3	9.9	5.1	5.6	2.1	2.4	1.7	1.5
38 Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	12.1	13.2	13.6	13.3	20.4	21.2	28.1	30.9	34.5
39 Barang lainnya	0.1	1.6	0.4	0.8	1.1	1.2	1.7	0.8	0.7
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Tabulasi penulis dari data mentah Statistik Industri Besar dan Menengah 1985 – 2005 dan Pendapatan Nasional Indonesia, beberapa tahun. Nilai untuk tahun 1975 diperoleh dari Bird (1999) dan Nilai untuk 2010 diperoleh dari Pendapatan Domestik Bruto.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tulisan ini telah mengkaji pergeseran struktur ekonomi dan industri Indonesia selama 40 tahun terakhir ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperlihatkan secara makro perkembangan sektor usaha Indonesia, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan strategi pelaku bisnis dan pemerintah. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi lapangan usaha mana yang sudah *sunset* dan lapangan usaha mana yang saat ini sedang *sunshine*, dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat mengidentifikasi sub-sektor industri mana yang akan menjadi prioritas pengembangan usahanya.

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia sebelum liberalisasi perdagangan dan industri pada 1987. Sektor ini merupakan sektor yang menjadi landasan dan tulang punggung perekonomian Indonesia sebelum pemerintah, melalui kebijakannya, menggeser fokus pengembangan industri pada sektor Manufaktur. Namun demikian, sektor ini semakin menurun kontribusinya terhadap PDB riil Indonesia 20 tahun belakangan ini.

Selain sektor Pertanian, sektor Pertambangan juga merupakan sektor yang memberikan sumbangan besar bagi PDB Indonesia di tahun 1975. Hanya saja, sumbangan sektor ini mengalami penurunan besar di tahun 1990. Pada 2010, sektor ini hanya memberikan kontribusi kurang dari 8 persen.

Di lain pihak, sektor manufaktur merupakan sektor yang sangat berkembang dalam kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Di tahun 1970-an, sektor ini hanya memberikan sumbangan kurang dari 10%. Namun, dengan adanya kebijakan bidang manufaktur, yang ditujukan untuk penguatan sektor ini menghadapi liberalisasi perdagangan, kontribusi sektor ini semakin besar. Sejak 1988, sektor manufaktur memberikan sumbangan di atas 20%, dan mencapai 28,36% di tahun 1996. Adanya krisis ekonomi menyebabkan penurunan kontribusi sektor Manufaktur terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, sektor ini tetap menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB riil, sampai tahun 2010.

Sektor jasa memberikan sumbangan yang semakin tinggi setelah krisis ekonomi 1997. Sektor ini mulai menjadi sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia dewasa ini. Meskipun kontribusinya secara persentase semakin meningkat, sektor ini belum masuk sebagai tiga penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Meneliti lebih rinci dalam sektor Manufaktur, industri Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) merupakan sub-sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi nilai tambah Manufaktur dari 1975 sampai 1991. Walaupun kontribusinya semakin menurun, sub-sektor ini tetap menjadi salah satu sub-sektor kunci dalam sektor Manufaktur.

Di lain pihak, sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) merupakan industri dengan sumbangan kedua terbesar bagi sektor Manufaktur dari 1975 sampai 1991. Setelah itu, sub-sektor ini menduduki urutan ketiga kontributor terbesar di Manufaktur. Dilihat dari polanya, sub-sektor ini mengalami penurunan dalam persentase kontribusi, terlihat dari semakin kecilnya proporsi industri ini dalam nilai tambah sektor Manufaktur, dari 20% pada 1975 menjadi 13,2% pada 2010.

Industri Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) menjadi sub-sektor yang semakin meningkat dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Sebelum 1991, sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah industri Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) dan industri Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35). Namun, kontribusi sub-sektor ini semakin meningkat dan melampaui industri Kimia, untuk menduduki posisi kedua sebagai penyumbang terbesar sektor Manufaktur.

Dari hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada pelaku bisnis dan pemerintah. Rekomendasi pertama adalah pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih dalam pengembangan sektor pertanian, dengan memfokuskan pada pengembangan *agri-business* (pertanian sebagai dasar bagi manufaktur). Sumber daya alam yang tersedia, dapat dijadikan dasar pengembangan sektor lain dengan sektor Pertanian sebagai sektor hulunya (*upstream sector*). Bagi pelaku bisnis, agribisnis dapat dikembangkan melalui komoditas-komoditas unggulan sektor pertanian yang dimiliki Indonesia, seperti buah-buahan tropikal. Rekomendasi kedua adalah sektor Manufaktur dapat tetap menjadi sektor andalan Indonesia dengan pertimbangan bahwa sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian selama 40 tahun belakangan ini. Rekomendasi ketiga, sektor Jasa dapat dijadikan sektor yang potensial untuk pengembangan ekonomi Indonesia di masa depan. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kontribusi sektor ini pada PDB. Rekomendasi keempat, sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan industri yang memberikan sumbangan terbesar dalam sektor Manufaktur, dan karena itu dapat direkomendasikan sebagai sub-sektor yang menjadi perhatian pemerintah dan pelaku bisnis. Sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatan merupakan sub-sektor yang sedang *sun-shine* dan akan berkembang di masa mendatang.

Meskipun hasil studi ini belum bisa secara rinci memberikan rekomendasi industri spesifik mana (sampai ISIC 5) yang menjadi industri dengan kontribusi terbesar, hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan rekomendasi secara makro tentang industri yang saat ini sedang berkembang dan menjadi industri kunci dalam perekonomian Indonesia. Hasil kajian makro ini, apabila di-komplemen-kan dengan kajian mikro sampai tingkat industri terkecil, dapat menjadi landasan yang baik bagi pelaku bisnis untuk strategi ekspansi usahanya.

Referensi

- Badan Pusat Statistik - BPS, (1975-2008), Statistik Industri Besar dan Menengah, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik - BPS, (1975-2010), Statistik Indonesia, Jakarta.
- Basri, M. C. (2004), Economic Updata 2003: After Five Years of *Reformasi Ekonomi*, What Next? In *Business in Indonesia: New Challenges, Old Problems*, ed. M. C. Basri and P. van der Eng, 39-57. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bird, K., (1999) *Industrial Concentration and Competition in Indonesian Manufacturing*. Unpublished PhD Thesis. Australian National University.
- Cole, D. C. dan Slade, B. F. (1998), Why Has Indonesia's Financial Crisis Been So Bad. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34, 61-66.
- Djiwandono, J. S. (2000), Bank Indonesia and the Recent Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36, 47-72.
- Fane, G. & Condon, T. (1996), Trade Reform in Indonesia, 1987-1995. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32, 33-54.
- Feridhanusetyawan, T. & Pangestu, M. (2004), Indonesia in Crisis: A Macroeconomic Perspective. *CSIS Economics Working Paper Series*, 074, 1-41.
- Goeltom, M. S. (1995), *Indonesia's Financial Liberalization: An Empirical Analysis of 1981-88 Panel Data* Singapore: ASEAN Economic Research Unit, Institute of Southeast Asian Studies.
- Hill, H. (1991), The Emperor's Clothes Can Now be Made in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 27, 89-127.
- Hill, H. (1999) *The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hill, H. (2000) *The Indonesian Economy since 1966*, 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pangestu, M. (1996) *Economic Reform, Deregulation, and Privatization: The Indonesian Experience*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Pangestu, M. (1997) The Indonesian Textiles and Garment Industry: Structural Change and Competitive Challenges. In M. Pangestu & Y. Sato (eds.) *Waves of Change in Indonesia's Manufacturing Industry*. Tokyo: Institute of Developing Economies, 63-94.
- Pangestu, M. dan Boediono (1986), Indonesia: The structure and Causes of Manufacturing Sector Protection. In C. Findlay & R. Garnaut (eds.) *The Political Economy of Manufacturing Protection: Experiences of ASEAN and Australia*. Sydney: Allen and Unwin.
- Prawiro, R. (1998), *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action* Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Soesastro, H. (2007) Comment on "Indonesia After the Asian Crisis". *Asian Economic Policy Review* 2 (1): 142-143.
- Soesastro, H. dan Basri, M. C. (1998), Survey of Recent Development. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34, 3-54.
- Thee, K. W. (1991), The Surge of Asian NIC investment into Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 27 (3): 55-88.

World Bank (2011), *World Development Indicator*, Database in CD, New York.

Perkembangan Bisnis dan Industri Indonesia 1979-2010

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

Perkembangan Bisnis dan Industri Indonesia 1979-2010

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.blackwellpublishing.com Internet Source	1%
2	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	www.iseas.edu.sg Internet Source	1%
5	Chua, . "Bibliography", Routledge Contemporary Southeast Asia Series, 2008. Publication	1%
6	HAL HILL. "THE INDONESIAN ECONOMY: GROWTH, CRISIS AND RECOVERY", The Singapore Economic Review, 2007 Publication	1%
7	Mohamad Ikhsan. "Total Factor Productivity Growth in Indonesian Manufacturing: A Stochastic Frontier Approach", Global	1%

Economic Review, 12/2007

Publication

8	Paresh Kumar Narayan. "An Analysis of Indonesia's Business Cycle", The Indian Economic Journal, 2017 Publication	1%
9	swopec.hhs.se Internet Source	<1%
10	www.eaber.org Internet Source	<1%
11	rudycr.tripod.com Internet Source	<1%
12	Takatoshi ITO. "Editors' Overview", Asian Economic Policy Review, 6/2007 Publication	<1%
13	www.icsead.or.jp Internet Source	<1%
14	www.tandfonline.com Internet Source	<1%
15	www.pc.gov.au Internet Source	<1%
16	dev.cah.utexas.edu Internet Source	<1%
17	bekasikota.go.id Internet Source	<1%

18

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1%

19

Resosudarmo, Budy P., and Ari Kuncoro. "The Political Economy of Indonesian Economic Reforms: 1983–2000", Oxford Development Studies, 2006.

Publication

<1%

20

essay.utwente.nl

Internet Source

<1%

21

www.bis.org

Internet Source

<1%

22

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

23

Submitted to University of Southampton

Student Paper

<1%

24

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

25

Willer, Ragnar Karl(Houben, Vincent J. H. and Wessel, Ingrid). "Dispelling the myth of a global consumer", Philosophische Fakultät III, 2006.

Publication

<1%

Exclude bibliography Off